

Pusat Kajian Anggaran | Badan Keahlian | Sekretariat Jenderal DPR RI

BUDGET ISSUE BRIEF

Politik & Keamanan

Vol. 02, Ed. 2, Februari 2022

Identitas Digital Nasional : Urgensi dan Tantangan Hal. 1

Dampak Pemekaran Wilayah Melalui Daerah Otonom Baru (DOB) Hal. 3

Potensi Korupsi di Tengah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Hal. 5



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN DEWAN
Working Professionally and Heartfully to Support
Legislative Budgetary Function



Daftar Isi

Identitas Digital Nasional: Urgensi dan Tantangan.....	1
Dampak Pemekaran Wilayah Melalui Daerah Otonom Baru (DOB)	3
Potensi Korupsi di Tengah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).....	5

Dewan Redaksi

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro

Redaktur

Ratna Christianingrum * Ade Nurul Aida

Tio Riyono * Riza Aditya Syafri

Editor

Satrio Arga Effendi

Sekretariat

Husnul Latifah * Musbiyatun

Memed Sobari * Hilda Piska Randini

Budget Issue Brief Politik dan Keamanan ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di terbitan ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Sekretariat Jenderal DPR RI.

Identitas Digital Nasional : Urgensi dan Tantangan

HIGHLIGHT

- Pengembangan Identitas Digital Nasional dirasa semakin penting bagi kemajuan ekosistem digital di Indonesia.
- Identitas digital adalah sebuah representasi digital untuk membedakan seorang pengguna dari pengguna lain di ruang digital.
- Ada beberapa manfaat yang diharapkan jika identitas digital nasional diimplementasikan, yaitu: *Economy Digital Trust*, mengurangi *fraud*, kemudahan berusaha, penghematan biaya dan anggaran, pertumbuhan ekonomi, pelayanan yang inklusif.
- Kominfo menyatakan akan melakukan pengembangan melalui kerangka regulasi, membangun ekosistem teknologi, serta penguatan talenta digital dalam kaitannya dengan pengembangan identitas digital nasional.
- Setidaknya ada 4 tantangan pengembangan Identitas Digital Nasional, yaitu: keamanan dan kerahasiaan data, kebutuhan anggaran yang besar, kesiapan infrastruktur TIK, dan kesiapan SDM.

Dalam beberapa tahun terakhir, inovasi pada layanan digital telah menjadi salah satu pendorong kemajuan ekosistem digital nasional. Sejalan dengan dinamika transformasi digital tersebut, kini semakin diperlukan adanya identitas digital untuk mendukung pengembangan ekosistem digital di Indonesia. Paradigma tersebut sejalan dengan tiga isu prioritas *Digital Economy Working Group* (DEWG) G20 yaitu pemulihan dan konektivitas pasca Covid-19, literasi dan keterampilan digital, serta arus data lintas batas negara yang terpercaya, dimana identitas digital yang aman menjadi benang merah isu tersebut. Dalam sebuah webinar daring pada awal Februari 2022, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (APTIKA) Kementerian Kominfo, Samuel Abriyani Pangerapan juga menjelaskan tentang betapa pentingnya kehadiran identitas digital untuk Indonesia.

Identitas digital adalah sebuah representasi digital untuk membedakan seorang pengguna dari pengguna lain di ruang digital. Mengutip dari situs Mitek, identitas digital merupakan gabungan antara segala jenis informasi data pribadi seperti nama lengkap, tanggal lahir, nomor kependudukan, dan data lainnya. Data pribadi yang terkandung dalam identitas digital ini biasanya digunakan bank atau institusi lain baik pemerintahan atau swasta untuk membuktikan identitas individu melalui proses validasi dan identifikasi.

Manfaat Identitas Digital Nasional

Ada beberapa manfaat yang akan didapat jika identitas digital nasional diimplementasikan, yaitu: 1) ***Economy Digital trust*** – dengan penguatan perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pemerintah, potensi *cybercrime* dapat diminimalisir dan kepercayaan masyarakat terhadap ekonomi digital semakin meningkat; 2) **Mengurangi *fraud*** – Studi LexisNexis (2019) menunjukkan bahwa ongkos *fraud* di Indonesia mencapai 1,66% dari pendapatan perusahaan, dimana 62% responden menempatkan verifikasi identitas sebagai masalah utama; 3) **Kemudahan berusaha** – Dengan transaksi tanpa tatap muka dan tanpa dokumen kertas, perizinan menjadi semakin mudah; 4) **Penghematan biaya dan anggaran** – Otomasi dan efisiensi pengelolaan dokumen dapat mendorong penghematan anggaran baik bagi instansi pemerintah ataupun swasta; 5) **Pertumbuhan Ekonomi** – Ada banyak potensi dan peluang baru dari identitas digital, khususnya di sektor ekonomi digital.

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab :

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

Penulis: Satrio Arga Effendi

McKinsey Global Institute memperkirakan kontribusi pertumbuhan GDP 3-13% di tahun 2030 dengan implementasi identitas digital; 6) **Pelayanan yang inklusif** – Pemerintah dan swasta dapat memberikan layanan secara lebih luas ke masyarakat secara efektif dan efisien, masyarakat pun dapat mengakses layanan dimanapun dan kapanpun secara cepat. Misalnya untuk mempersingkat registrasi pasien di rumah sakit, murid di sekolah atau kampus, bahkan saat daftar di situs *online*. Jadi, tidak perlu lagi memasukkan data identitas secara berulang.

Dalam siaran pers Februari 2022, Kominfo menyatakan akan melakukan pengembangan melalui kerangka regulasi, membangun ekosistem teknologi, serta penguatan talenta digital dalam kaitannya dengan pengembangan identitas digital nasional. Dari aspek regulasi, Indonesia telah memiliki Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta Peraturan Menteri Kominfo Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Khususnya mewajibkan pengguna Tanda Tangan Elektronik (TTE) tersertifikasi.

Untuk langkah pengembangan kedua, Kementerian Kominfo membangun infrastruktur teknologi yang berfokus pada *digital trust*. Dan langkah ketiga, Kementerian Kominfo melakukan penguatan talenta digital agar mengenal konsep dan manfaat identitas digital.

Pembahasan tentang implementasi identitas digital bukan hanya baru-baru ini terjadi. Beberapa negara yang telah mengembangkan sistem identitas digital secara serius antara lain adalah India, Estonia, Australia, Amerika Serikat. Di wilayah Asia Tenggara, Singapura sudah memiliki sistem identitas digital dengan nama SingPass. Filipina dengan nama The Philippine Identification System (PhilSys). Pengembangan tersebut

bertujuan untuk memudahkan berbagai bentuk layanan baik yang disediakan pemerintah maupun pihak swasta.

Sementara itu, di Indonesia sendiri sampai saat ini implementasi identitas digital masih hanya sebatas penggunaan tanda tangan elektronik. Bahkan, KTP elektronik yang menjadi identitas penduduk pun masih banyak bermasalah dan label digital/elektronik pada KTP tersebut hanya sebatas gimik belaka. Oleh karena itu, Pemerintah perlu segera membangun Sistem Identitas Digital Nasional agar pengembangan ekonomi digital di Indonesia tidak tertinggal dengan negara lainnya.

Tantangan Pengembangan Identitas Digital

Pengembangan identitas digital nasional tentu bukan perkara mudah. Ada setidaknya 4 tantangan dalam penerapan Identitas Digital, yaitu: 1) **Keamanan dan kerahasiaan data** – Pemerintah harus membangun sistem yang sedemikian canggih, sehingga keamanan dan kerahasiaan data dapat terjamin. Mengingat kebocoran data menjadi salah satu masalah besar yang hingga kini masih menghantui Indonesia; 2) **Kebutuhan anggaran yang besar** – pengembangan identitas digital nasional tentu membutuhkan anggaran yang besar, serta membutuhkan perencanaan yang matang; 3) **Infrastruktur TIK** – Persoalan teknologi yang mendasar seperti kurangnya infrastruktur TIK di Indonesia. 4) **Kesiapan SDM** – SDM dengan kualifikasi keahlian di bidang TIK masih terbatas. Selain itu, literasi digital masyarakat Indonesia juga masih rendah.

Pemerintah harus bersiap dalam menghadapi gempuran inovasi teknologi di segala bidang, sehingga Indonesia dapat bersaing dengan negara lain dalam hal transformasi digital. Oleh karena itu, penerapan identitas digital menjadi sangat penting untuk memungkinkan terwujudnya sistem identifikasi yang terintegrasi serta dapat merangkul seluruh individu secara global.

Dampak Pemekaran Wilayah Melalui Daerah Otonom Baru (DOB)

HIGHLIGHT

- Pemekaran daerah merupakan pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kota dan kabupaten dari induknya.
- Salah satu rencana pembentukan DOB yaitu pada Pembentukan DOB di Papua.
- Pemekaran wilayah juga berdampak secara langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- DOB masih akan bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat karena PAD rata-rata hanya akan mencukupi 5-10% dari kebutuhan belanja pemerintah daerah.
- Hal yang perlu diperhatikan dalam Pembentukan DOB: pendampingan pemerintah, Pengalihan aparatur yang sesuai kapasitasnya, penyiapan infrastruktur perekonomian beserta fasilitas pemerintahan, infrastruktur penunjang bagi aparatur dan pembagian sumber daya.

Pemekaran daerah merupakan pembentukan wilayah administratif baru di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dari induknya. Tercatat sejak era reformasi hingga kini telah terjadi 7 pemekaran wilayah provinsi dan 102 pemekaran wilayah kabupaten/kota. Landasan hukum untuk pemekaran daerah di Indonesia adalah UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Terdapat beberapa alasan mengapa pemekaran wilayah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peningkatan pelayanan publik.

Pertama, keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pembentukan DOB baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.

Kedua, mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergal.

Ketiga, penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan pembagian kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak yang mengikuti pemekaran wilayah. (Bappenas, 2008)

Salah satu rencana pembentukan DOB yaitu pada Pembentukan DOB di Papua. Sesuai dengan amanat pada UU No. 2/ 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang mana pada pasal 76 diamanatkan bahwa pembentukan DOB di Papua dapat dilakukan bersifat *bottom up* ataupun *top down*.

Menurut Pemerintah, pembentukan DOB di Papua selain pertimbangan kepentingan strategis nasional dalam rangka mengkokohkan NKRI, juga masalah percepatan pembangunan kesejahteraan masyarakat, serta memelihara citra positif Indonesia di mata Internasional. Akar utama masalah gangguan keamanan di Papua adalah masalah ekonomi, kemiskinan, sosial budaya, dan

PUSAT KAJIAN ANGGARAN
Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab :

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

Penulis: Rendy Alvaro · Nova Aulia Bella

lainnya, sehingga pemekaran menjadi salah satu upaya untuk mempercepat pembangunan dan mempermudah birokrasi. Adapun jumlah Provinsi di Papua yang semula hanya ada 2, yakni Provinsi Papua dan Papua Barat, nantinya akan dimekarkan menjadi 7 Provinsi.

Dampak Pembentukan DOB

Meskipun dapat memberikan berbagai manfaat yang dapat menyentuh langsung kepada masyarakat lokal, pemekaran wilayah juga berdampak secara langsung terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Juanda (2007). Bagi pemerintah pusat, menambah beban APBN karena harus menyediakan dana untuk membangun gedung kantor, gaji pegawai, dan biaya operasional instansi vertikal di daerah.

Pemerintah pusat juga perlu mengeluarkan anggaran untuk pembangunan sarana-sarana umum di daerah hasil pemekaran berupa gedung-gedung perkantoran pemerintahan, fasilitas Kesehatan dan Pendidikan untuk masyarakat. Selain itu, dibutuhkan juga anggaran pembiayaan SDM yang akan dipekerjakan di wilayah hasil pemekaran tersebut. Sebagai contoh menurut kajian yang dilakukan Maulana (2019), diestimasi dana yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan daerah otonom baru tingkat Provinsi sebesar Rp156 miliar dan persiapannya sebesar Rp4,5 triliun.

Dampak pemekaran daerah kepada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) salah satunya melalui pengurangan proporsi DAU karena bertambahnya jumlah daerah (faktor pembagi). Demikian juga pemerintah harus menyediakan DAK bidang prasarana pemerintah untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintah sebagai akibat dari pemekaran. DOB masih akan bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat karena PAD rata-rata hanya akan mencukupi 5-10% dari kebutuhan belanja pemerintah daerah. Daerah hasil pemekaran yang telah

lama dimekarkan pun selama ini mayoritas juga masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, sehingga beban pemerintah pusat semakin bertambah seiring dengan bertambahnya daerah hasil pemekaran. Implikasi lainnya, pemerintah daerah perlu menganggarkan tambahan anggaran dalam APBN untuk tambahan anggota DPRD Kabupaten, Bupati, Wakil Bupati, serta OPD-OPD yang dibentuk di DOB.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Pembentukan DOB. Perlu dilakukan pendampingan oleh Pemerintah seperti yang selama ini telah dilakukan oleh Kemendagri terhadap DOB. Selain itu perlu juga menentukan target capaian DOB dan melakukan evaluasi secara berkala terkait capaian Pemerintah hasil dari DOB tersebut. *Variable* yang dapat dijadikan indikator target capaian DOB dapat meliputi target aspek ekonomi dan pelayanan masyarakat. Pengalihan aparatur yang sesuai kapasitasnya, penyiapan infrastruktur perekonomian beserta fasilitas pemerintahan, infrastruktur penunjang bagi aparatur perlu direncanakan secara matang sehingga percepatan di daerah pemekaran dapat terwujud.

Pemerintah juga perlu memperhatikan pembagian sumberdaya yang akan dimiliki oleh Provinsi/Kabupaten Induk dan Provinsi/kabupaten DOB, baik berupa sumberdaya alam maupun BUMD. Bagi daerah yang mengandalkan sumberdaya alam sebagai pendapatan utama daerah, pemekaran sebaiknya mempertimbangkan pembagian kekayaan sumberdaya alam daerah induk dan daerah hasil pemekaran. Jangan sampai dengan pemekaran membuat kapasitas fiskal daerah induk menjadi turun drastis. Pemerintah perlu melakukan reformulasi alokasi sumber daya yang akan dimiliki sehingga memberikan keadilan baik daerah induk dan juga DOB hasil pemekaran.

Komisi III

POLITIK DAN KEAMANAN

Potensi Korupsi di Tengah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

HIGHLIGHT

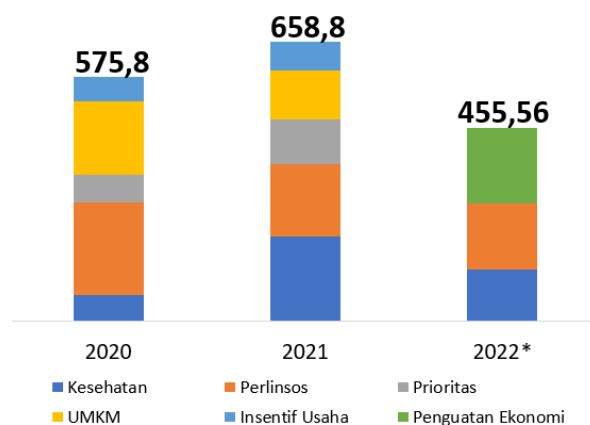
- Pandemi Covid-19 memberikan dampak pada meningkatnya pengangguran dan angka kemiskinan yang cukup signifikan.
- Guna menggerakkan roda perekonomian, pemerintah menginisiasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
- Pinjaman PEN Pemda menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi daerah dalam mendanai kegiatan-kegiatan prioritasnya terutama dalam menangani dampak pandemi Covid-19.
- Perkara dugaan suap dalam penyaluran pinjaman program PEN untuk Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara sangat mencoreng pemerintah
- Akar masalah dari penyelewengan anggaran PEN ini ialah belum adanya tata Kelola anggaran yang benar dalam penanggulangan Covid-19.
- Dengan semakin tingginya dukungan anggaran penanganan tindak pidana korupsi, diharapkan dapat teratasi dengan baik.

Pentingnya PEN di tengah Pandemi

Pandemi Covid-19 yang terjadi menyebabkan terhentinya perekonomian di Indonesia. Banyak masyarakat yang terkena dampaknya. Selama pandemi terjadi, tingkat pengangguran di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Angka kemiskinan juga mengalami peningkatan yang cukup berarti. Konsumsi, sebagai penopang perekonomian Indonesia, mengalami penurunan di masa pandemi. Hal ini dikarenakan adanya penurunan daya beli masyarakat di masa pandemi. Berdasarkan hasil Survei Dampak Covid-19 oleh BPS (2020) menyimpulkan bahwa terdapat 41,91 % masyarakat mengalami penurunan pendapatan. Kemudian menurut status pekerjaan, terdapat 2,52 % masyarakat terkena PHK dan sementara itu 18,34 % mengaku masih bekerja namun sementara dirumahkan. Tentu jumlah tersebut merupakan angka yang sangat signifikan apalagi ditambah dengan semakin parahnya ancaman Covid-19 pada waktu-waktu tertentu.

Guna menggerakkan roda perekonomian, pemerintah menginisiasi program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program ini merupakan respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi, khususnya sektor informal dan UMKM. Pembiayaan dalam PEN terdiri dari 5 klaster namun mengalami penurunan menjadi 3 klaster pada 2022 (Gambar 1).

Gambar 1. Realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional 2020-2021
(Dalam Triliun Rupiah)



*Nota Keuangan APBN 2022

Sumber: Kemenkeu, 2022

Pinjaman Daerah Sebagai Solusi

Salah satu bentuk PEN yang dilakukan ialah pinjaman PEN Pemerintah Daerah. Pinjaman PEN Pemda menjadi salah satu alternatif pembiayaan bagi daerah dalam mendanai kegiatan-kegiatan prioritasnya terutama dalam menangani dampak pandemi Covid-19. Pinjaman daerah merupakan salah satu instrumen atau modalitas

PUSAT KAJIAN ANGGARAN

Badan Keahlian DPR RI
Sekretariat Jenderal DPR RI

Penanggung Jawab :

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Redaktur: Rendy Alvaro · Ratna Christianingrum · Ade Nurul Aida · Tio Riyono · Satrio Arga Effendi · Riza Aditya Syafri

Penulis: Ratna Christianingrum · Azizah Ulfa · Tio Riyono

pembiayaan alternatif potensial dan sangat mungkin dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengatasi defisit APBN dan keterbatasan kemampuan keuangan daerah.

Setiap program yang direncanakan pemerintah untuk menstimulus roda perekonomian tidak akan terlaksana secara optimal apabila terjadi penyimpangan ataupun korupsi. Perkara dugaan suap dalam penyaluran pinjaman program PEN untuk Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara sangat mencoreng pemerintah.

Pencairan pinjaman dana PEN oleh Pemda Kabupaten Kolaka Timur seharusnya digunakan untuk membantu pelaksanaan proyek sekaligus menciptakan lapangan kerja di wilayahnya. Bantuan ini seharusnya mendorong pembelian bahan baku lokal, yang pada akhirnya diharapkan bisa memutar roda perekonomian di wilayah Kabupaten Kolaka Utara.

Potensi Korupsi

Salah satu syarat dari pemberian pinjaman PEN ialah daerah yang mengajukan pinjaman harus memiliki rasio kemampuan fiskal untuk mengembalikan dana paling sedikit 2,5 kali dari nilai pinjaman. Dimana rasio kemampuan fiskal tersebut dituangkan dalam sebuah surat rekomendasi dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. Hal inilah yang ditengarai menjadi penyebab adanya perdagangan kewenangan saat menilai kapasitas daerah dalam menerima pinjaman

Akar masalah dari penyelewengan ini ialah belum adanya tata Kelola anggaran yang benar dalam penanggulangan Covid-19. Hal ini terlihat dari banyaknya kelemahan yang terjadi dalam program-program bantuan pemerintah. Dalam keadaan darurat apapun, pemerintah tidak boleh mengabaikan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan. Hal ini sejalan dengan laporan yang disampaikan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW), dimana tindak pidana korupsi justru mengalami peningkatan di masa pandemi. ICW menyatakan perkara yang disidangkan meningkat dari 1.019 (2019) menjadi 1.218 (2020) serta total terdakwa meningkat dari 1.125 (2019) menjadi 1.298 (2020). Hal ini dikarenakan proses pembelanjaan yang dilakukan di masa pandemi

dilakukan secara darurat, sehingga transparansi dan akuntabilitas sektor publik dikesampingkan. Prioritas penggunaan dana di masa pandemi ialah respon yang cepat atas situasi genting.

Keberadaan UU No. 2 Tahun 2020 mengundang *moral hazard*. Hal ini dikarenakan terdapat klausul yang menyebutkan bahwa pejabat yang berkaitan dengan pelaksanaan penanganan pandemi tidak dapat dituntut perdata ataupun pidana. Hal ini menjadi tameng bagi para penanggung jawab anggaran dan pelaku bisnis untuk mengambil jalan pintas. Yang pada akhirnya dana PEN telah menjadi ladang korupsi.

Anggaran Penanganan Tindak Pidana Korupsi

Dengan adanya tren peningkatan tindak pidana korupsi di masa pandemi, anggaran penanganan tindak pidana korupsi juga mengalami peningkatan. Saat ini di Indonesia terdapat 3 lembaga yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi. Ketiga Lembaga tersebut ialah Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, anggaran Kepolisian meningkat 14,6% menjadi Rp111,02 triliun pada 2022 dari *outlook* 2021. Adapun anggaran untuk penyidikan dan penyelidikan tindak pidana senilai Rp5,53 triliun pada tahun ini. Anggaran belanja Kejaksaan naik 26,61% menjadi Rp10,11 triliun pada tahun ini dibanding *outlook* 2021. Rinciannya, Rp619,8 miliar untuk program penegakan dan pelayanan hukum dan Rp9,49 triliun untuk program dukungan manajemen. Anggaran KPK juga meningkat 37,09% menjadi Rp 1,3 triliun pada 2022 dari *outlook* 2021. Dengan rincian, anggaran untuk program pencegahan dan penindakan perkara korupsi Rp520,6 miliar dan untuk dukungan manajemen Rp822,7 miliar.

Dengan semakin tingginya dukungan anggaran guna penanganan tindak pidana korupsi, kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia diharapkan dapat teratasi dengan baik. Sehingga, pada akhirnya semakin banyak uang rakyat yang terselamatkan.